

PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERDAYAAN ENTREPRENEURSHIP UNTUK MENGEMBANGKAN WIRUSAHAWAN KECIL MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL

WIWIK MARYATI
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIPDU JOMBANG
Email: wima08@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan kondisi aktual yang dialami oleh wirausahawan kecil saat ini dan berupaya memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya pengembangan entrepreneurship. Jika melihat kondisi saat ini, masih banyak wirausahawan kecil yang bertahan dengan usaha yang mereka kelola secara konvensional dan belum nampak ada pengembangan usaha. Hal ini menjadikan wirausahawan kecil tersebut sulit beradaptasi dengan lingkungan global yang penuh persaingan. Rendahnya motivasi untuk mengembangkan usaha dikarenakan sulitnya faktor permodalan yang bisa diatasi dengan program pemberdayaan entrepreneurship. Program pemberdayaan entrepreneurship dilakukan dengan memberikan fasilitas tidak hanya berupa pinjaman permodalan namun juga kemudahan akses mendapatkan permodalan. Kemudahan akses inilah yang menjadikan permasalahan besar bagi wirausahawan kecil. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini, perguruan tinggi berperan sebagai lembaga pendukung non-finansial yang menjamin kemudahan akses permodalan. Melalui jalinan kerjasama antara perguruan tinggi dengan perbankan sebagai sumber permodalan akan memudahkan peran perguruan tinggi dalam memediasi akses permodalan tersebut.

Kata kunci: *peran perguruan tinggi, pemberdayaan entrepreneurship, persaingan global*

ABSTRACT

This article aims to describe the actual conditions faced by small entrepreneurs today and seeks to contribute ideas towards entrepreneurship development efforts. If look at current conditions, many small entrepreneurs who survive with businesses that they manage in conventional and yet there appears to enterprise development. It makes small entrepreneurs difficult to adapt in a competitive global environment. Low motivation to develop the business due to the difficulty factor of capital that can be overcome with entrepreneurship empowerment program. Entrepreneurship empowerment program carried out by providing facility is not only capital loan but also the ease of getting access to capital. Ease of access is what makes the big problem for small entrepreneurs. Solution to overcome these problem, the universities acts as a non-financial support institutions that ensure ease of access to capital. Through the fabric of cooperation between university and banks as sources of capital will facilitate the role of universities in mediating the access to capital.

Key words: *the role of universities, entrepreneurship empowerment, global competition*

PENDAHULUAN

Dampak yang bisa dirasakan dari pesatnya laju perkembangan triple T (*technology, trade dan transportation*) adalah fenomena globalisasi yang semakin hari semakin intens tak dapat dihindari. Hal itu tentu saja membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Pengaruh perubahan tersebut membuat pergeseran persaingan dunia menjadi semakin ketat. Negara-negara akan terlibat dalam sebuah persaingan dan berusaha menempatkan diri pada posisi yang terbaik dalam struktur persaingan yang sangat ketat itu. Dengan kata lain berusaha pada posisi “papan atas” dalam berkompetisi. Namun yang perlu kita sadari betapapun kuatnya keinginan untuk menempatkan diri pada “papan atas”, yang perlu diperhatikan untuk negara kita ini adalah adanya kesenjangan dalam pengembangan. Misalnya, pengembangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal maupun pengembangan antara kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi tertinggal dengan kelompok masyarakat ekonomi menengah dan ekonomi atas. Artinya kita akan mampu bersaing dalam lingkungan global ini apabila kondisi perekonomian negara kita juga mendukung. Ini diperlukan karena globalisasi disatu sisi tidak hanya menciptakan banyak kesempatan, tetapi juga menciptakan banyak tantangan yang apabila tidak dihadapi akan menjadi ancaman (Tambunan, 2003:328).

Sejauh ini *entrepreneurship* (kewirausahaan) dipandang sebagai solusi yang dapat membantu perekonomian negara dimana indikator keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya adalah bebasnya negara dari persoalan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat sangat mungkin akan meningkatkan peluang kesempatan kerja yang luas. Oleh karena itu himbauan dari pemerintah untuk menggiatkan kegiatan kewirausahaan semakin hari gaungnya semakin kencang.

Namun sayangnya dalam kenyataannya minat masyarakat terhadap kewirausahaan ternyata masih rendah. Rendahnya minat masyarakat dalam berwirausaha ini muncul dari paradigma yang salah dalam pemahaman masyarakat, dimana berwirausaha diperlukan modal besar dan harus dilakukan dalam skala yang besar pula (Aadesanjaya, 2011). Kalaupun kewirausahaan sudah dilakukan, ada keengganan dari para wirausahawan tersebut khususnya wirausahawan skala kecil untuk mengembangkan usahanya. Mereka cenderung bertahan dengan model usaha konvensional yang mereka kelola selama ini (Tambunan, 2003:329). Mengapa para wirausahawan tersebut cenderung bertahan dengan usaha kecilnya? Faktor utama yang menyebabkan kurang termotivasinya mereka untuk mengembangkan usaha adalah faktor permodalan.

Melihat kenyataan di atas, persoalan tersebut harus disikapi dan direspon oleh berbagai pihak, baik pihak perbankan selaku sumber permodalan maupun pihak institusi non-finansial sebagai pendukung sumber permodalan yang berfungsi untuk memperkuat posisi wirausahawan. Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi non-finansial yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan menghasilkan orang-orang yang berilmu pengetahuan saja, tetapi juga merupakan aset yang dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat misalnya untuk penggiatan ekonomi kerakyatan ataupun pemberdayaan *entrepreneurship* (kewirausahaan) khususnya pengembangan Usaha Kecil Mikro (UKM). Melalui peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan *entrepreneurship* para wirausahawan khususnya yang mempunyai usaha skala kecil diharapkan bisa bersaing dalam kompetisi global.

Peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan perguruan tinggi dalam program pemberdayaan

entrepreneurship merupakan wujud tugas pengabdian kepada masyarakat yang harus diemban oleh perguruan tinggi.

Tulisan ini berupaya menguraikan permasalahan aktual yang dialami wirausahawan kecil saat ini untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam upaya mengembangkan wirausahawan kecil menghadapi persaingan global.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskripsi, dimana kami mencoba melakukan telaah atau analisis dari fenomena aktual yang sedang terjadi dengan mendasarkannya pada pengkajian literatur.

PEMBAHASAN

1. Permasalahan Wirausahawan Kecil

Saat ini kewirausahaan kian marak dilakukan karena orientasinya pada bisnis dan profit yang akan didapat. Seorang *entrepreneur* (wirausahawan) adalah orang yang merubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya dan juga orang yang melakukan perubahan, inovasi dan cara-cara baru. Oleh karena itu wirausahawan dituntut berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka dan mengembangkan usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. (Kasmir, 2007:18).

Wirausahawan yang berhasil menurut Wiratmo, M. (2004) dan Winardi (2003) mempunyai standart potensi kewirausahaan yang dapat dilihat pada ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kemampuan inovatif
- b. Toleransi terhadap kemenduaan (*ambiguity*)
- c. Keinginan untuk berprestasi
- d. Kemampuan perencanaan realistis
- e. Kepemimpinan berorientasi pada tujuan
- f. Obyektivitas
- g. Tanggung jawab pribadi
- h. Kemampuan beradaptasi (*Flexibility*)
- i. Kemampuan sebagai organisator dan administrator
- j. Tingkat komitmen tinggi (*survival*)

Apabila diperhatikan ciri-ciri wirausahawan yang berhasil sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya kembali pada pribadi individu seorang wirausahawan sendiri apakah dia mempunyai minat dan motivasi atau tidak untuk mengembangkan usahanya. Faktor lainnya selain pribadi wirausahawan adalah faktor yang berfungsi sebagai pendukung yang dapat berupa faktor lingkungan maupun faktor regulasi dari pemangku kebijakan. Faktor lingkungan merujuk pada potensi yang ada pada lingkungan di sekitar usaha, misalnya lingkungan masyarakat maupun lingkungan alam yang bisa dimanfaatkan oleh para wirausahawan. Sedangkan faktor regulasi dari pemangku kebijakan merujuk pada dukungan finansial maupun non-finansial dari pemerintah setempat.

Dari beberapa faktor sebagaimana disebutkan di atas, yang menyebabkan para wirausahawan kurang termotivasi untuk mengembangkan usaha khususnya wirausahawan kecil adalah karena kurang efektifnya faktor pendukung berupa regulasi dukungan finansial dari pemerintah. Selama ini pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi pada tahun 2002 sudah membuka akses pelayanan perbankan untuk UKM (Usaha Kecil Mikro). Melalui paket tersebut para wirausahawan kecil mendapatkan fasilitas pinjaman modal dari perbankan,

namun kurang efektif dalam pelaksanaannya. Kurang efektifnya akses pelayanan perbankan ini disebabkan adanya persyaratan berupa jaminan (*borg*) yang tidak mudah dipenuhi oleh para wirausahawan kecil tersebut. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Juwono (2011) dalam artikelnya bahwa model pengembangan kewirausahaan yang sesuai untuk kondisi masyarakat Indonesia adalah dengan mendorong peningkatan kegairahan berwirausaha di antara para calon wirausahawan dan fasilitatornya yang dilakukan bersamaan dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan calon wirausahawan dalam memulai, menjalankan dan membesarkan bisnisnya.

Penyediaan sarana dan prasarana inilah yang kemudian memunculkan apa yang dinamakan dengan program fasilitasi *entrepreneurship* atau dinamakan dengan pemberdayaan *entrepreneurship*. Pemberdayaan *entrepreneurship* ini diarahkan tidak hanya pada penyediaan modal usaha saja yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan perbankan, akan tetapi juga pada kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha tanpa adanya persyaratan rumit yang harus disediakan oleh wirausahawan kecil tersebut.

2. Pemberdayaan *Entrepreneurship*

Pemberdayaan *entrepreneurship* menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Sebagaimana dikatakan oleh Sijabat (2011) dalam artikelnya tentang UMKM menyatakan bahwa pemberdayaan *entrepreneurship* terutama yang terlihat pada Unit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan solusi terbaik untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya nasional, sesuai amanat pasal (4) dan pasal (5) UU Nomor 20 Tahun 2008. Namun demikian menjadikan UMKM sebagai basis pembangunan daerah yang sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan nasional masih dihadapkan pada banyak masalah antara lain: 1) rendahnya produktifitas UMKM yang berdampak pada timbulnya kesenjangan antara UMKM dengan usaha besar; 2) terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif seperti permodalan, teknologi, informasi dan pasar; 3) tidak kondusifnya iklim usaha yang dihadapi oleh UMKM, sehingga terjadi marjinalisasi dari kelompok ini.

Untuk itu menurut Kumoro, W. (2008) perlu upaya menggiatkan kewirausahaan berupa penguatan kelembagaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Upaya itu dapat dilaksanakan dengan strategi 1) perluasan akses kepada sumber permodalan, terutama perbankan, 2) memperbaiki lingkungan usaha dan prosedur perijinan, dan 3) memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung non-finansial. Apa yang disampaikan oleh Kumoro tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya lembaga keuangan dan perbankan saja yang harus terlibat dalam pemberdayaan sebagai sumber permodalan, tetapi lembaga-lembaga atau institusi lain sebagai pendukung non-finansial juga harus terlibat dalam penguatan kelembagaan UMKM.

Alasan lainnya mengapa kelembagaan UMKM perlu diperkuat melalui penggiatan kewirausahaan, tidak lain karena sektor UMKM telah terbukti tangguh terhadap krisis ekonomi. Selama tahun 1997-2006, jumlah perusahaan berskala UKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Sumbangan UKM terhadap produk domestik bruto mencapai 54%-57%. Sumbangan UKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96%. Sebanyak 91% UKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak ketiga eksportir/pedagang perantara, dan hanya 88% yang berhubungan langsung dengan pembeli/importir di luar negeri (Afiah, 2009).

3. Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan *Entrepreneurship*

Perguruan tinggi adalah lembaga yang paling merasakan tuntutan perubahan global karena bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia usaha, pemerintah

dan masyarakat yang memerlukan ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi serta ilmu-ilmu multidisiplin lainnya akan menuntut perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan mereka akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi. Effendi (2003) menyatakan bahwa masyarakat sekarang mempercayakan kepada perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang masih memiliki kekuatan moral untuk menjadi panutan masyarakat dalam transformasi menuju masyarakat global.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa peran perguruan tinggi sangat strategis diperlukan juga dalam pemberdayaan *entrepreneurship*. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasyid (2007) dalam penelitiannya yang merekomendasikan perlunya dilakukan kegiatan pemberdayaan UKM oleh perguruan tinggi yang dibantu oleh pemerintah dan pihak lain yang terkait agar dapat mewujudkan UKM sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi mediator UKM pada pemerintah dan lembaga keuangan dalam rangka peningkatan produktivitas UKM melalui upaya pembentukan keterkaitan (*inter firm linkage*). Melalui model keterkaitan ini diharapkan terjadi kolaborasi antara UKM dengan lembaga terkait yang bisa pemerintah, lembaga keuangan dan perbankan maupun lembaga non finansial lainnya termasuk perguruan tinggi. Model ini membantu memberikan solusi pada permasalahan UKM baik masalah keuangan, pemasaran, pengembangan manajemen maupun pengembangan produk dan teknologi.

Kita semua tahu bahwa saat ini banyak perguruan tinggi yang sudah menjalin kemitraan dengan pihak perbankan sebagai salah satu sarana yang memudahkan aktivitas pendidikan di perguruan tinggi, terutama untuk kelancaran proses administrasi keuangan. Kemitraan yang dijalin antara perguruan tinggi dengan perbankan menjadikan timbulnya kepercayaan antar mitra, sehingga kepercayaan tersebut dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk ikut terlibat dalam pemberdayaan *entrepreneurship*. Dalam hal ini para wirausahawan kecil yang mempunyai masalah dengan akses permodalan dapat menggunakan jasa perguruan tinggi sebagai pihak penjamin kemudahan akses tersebut. Tentunya perguruan tinggilah yang nantinya akan menetapkan kriteria maupun persyaratan-persyaratan untuk kelayakan dari wirausahawan tersebut mendapatkan permodalan.

Berdasarkan kondisi yang demikian maka sudah sepatutnya perguruan tinggi ikut berperan dalam pemberdayaan *entrepreneurship*, karena peran perguruan tinggi sebagai mediator akses permodalan akan memberikan dampak efektif bagi wirausahawan kecil. Hal ini sekaligus menepis anggapan masyarakat yang selama ini menganggap bahwa perguruan tinggi hanya sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih dari perguruan tinggi ternyata juga mampu memberikan kontribusi terhadap kebutuhan para *entrepreneur*.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa sudah semestinya perguruan tinggi ikut berperan aktif dalam pemberdayaan *entrepreneurship*. Ini sejalan dengan tugas Tri Dharma yang harus diemban oleh perguruan tinggi, terutama tugas pengabdian kepada masyarakat agar dapat menjadikan masyarakat (dalam hal ini adalah para wirausahawan kecil) yang mampu berdaya saing di era global ini. Melalui peran perguruan tinggi yang bertindak sebagai mediator akses permodalan pada lembaga keuangan dan perbankan, para wirausahawan kecil dapat mengatasi permasalahannya sehingga mereka akan termotivasi untuk mengembangkan usahanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Bapak Rektor Unipdu yang telah memotivasi dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Seminar Nasional Competitive Advantage II ini.
2. Ibu Dr. Siti Komariyah, M.Si yang telah membimbing dan mengapresiasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aadesanjaya. 2011. Manajemen Kewirausahaan. www.aadesanjaya.blogspot.com. Diakses tanggal 24 Mei 2012
- Afiah, N.N. 2009. Peran Kewirausahaan Dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi Krisis Finansial Global. *Working Paper in Accounting and Finance*. (Oktober): 1-8.
- Effendi, S. 2003. Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global. 1-12. www.sofian.staff.ugm.ac.id diakses tanggal 13 Juli 2010.
- Joewono.H. 2011. Strategi Pengembangan Kewirausahaan Nasional: Sebuah Rekomendasi Operasional. *Jurnal Infokop*. (Vol. 19): 1-23.
- Kasmir. 2007. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Perkasa.
- Kumorotomo, W. 2008. Perubahan Paradigma Pemerintah dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. www.kumoro.staff.ugm.ac.id Diakses tanggal 19 Maret 2012.
- Rasyid, R. 2007. Keterkaitan Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Sumatra Barat. *Jurnal Eksekutif*. (Vol. 4 No. 3): 217-230
- Sijabat, S. 2011. Dampak Penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Terhadap Pengembangan Kewirausahaan Bagi UMKM. *Jurnal Infokop*. (Vol. 19): 86-103.
- Tambunan, T T.H. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Winardi. 2003. *Entrepreneur & Entrepreneurship*. Jakarta: Kencana.
- Wiratmo, M. 2004. *Kewirausahaan: Seri diktat kuliah Gunadarma*. Jakarta.